



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

RENCANA KERJA 2026



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia – Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam, Beserta Kerabat, Sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Koperasidan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode 2021-2026. pada Tahun 2026 menjadi tahun kelima dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah atau Rencana Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) Tahun 2021-2026

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini.

Demikian dan dengan Izin dan Kehendak-Nya semoga dokumen ini dapat memberikan arah yang sinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Tenggarong, 21 Maret 2025

Plt.Kepala Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara



H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi., M.A.P

NIP.197401222001121002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD	14
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD	35
BAB IV. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
 BAB V PENUTUP	48
 LAMPIRAN CAPAIAN PROGRAM DEDIKASI BUPATI KUTAI KARTANEGARA	

DAFTAR TABEL

Hal :

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2024 (TC. 29)	7
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM (TC.30)	16
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (TC. 31)	19
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (TC. 32)	31
3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026	37
4.1	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas (TC. 33)	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan merupakan Rencana Kerja Tahunan yang paralel dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan kegiatan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk mencapai keterpaduan Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengacu pada Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dan Pasal 3 ayat (2) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Disebutkan juga dalam Pasal 3 ayat (3) Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu dalam mengimplementasikan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut maka setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD atau sekarang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Renja SKPD/OPD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD/OPD.

Renja OPD merupakan Dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengopersionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – OPD) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Pasal 263 bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mempunyai amat bertanggung jawab

dalam menyusun program, yang berpedoman pada kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi;
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
19. Surat Edaran Nomor : B - 1383 / 065.11 / BAPP / 2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2026, dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara.

2. Tujuan

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja-PD, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja-PD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran dari visi dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dengan uraian program dan kegiatan yang merupan panjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan / dikemukakan rencana kerja pendanaan program dan kegiatan, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB V. PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja tahun ke - V yang merupakan turunan dari rencana strategis yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2021-2026;

Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong diantaranya keterhambatan beberapa kerbatasan cara berinovasi dari sumber daya manusia yang ada, mapping data yang belum maksimal, dan belum terdapat penyusunan roadmap yang pasti untuk menajankan program kegiatan yang ada. yang menjadi pendorong adalah terlaksanya seluruh program kegiatan sehingga tercapai pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan.

Maka dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 (TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Dinas Koperasi dan UKM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17				KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2.17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,00	85,40	73,00	61,54	84%	77	77	96,25%
	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	11	4	4	100%	4	19	95,00%
	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%
	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	15	9	3	3	100%	3	15	100,00%
	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	0	0	0	0%	2	2	100,00%

	01	2	01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung StatistikSektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
	01	2	01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik SektoralDaerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
	01	2	01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat DaerahBerdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalamRangka Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	10	4	2	2	100%	2	8	80,00%
	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	36	12	12	100%	12	60	100,00%
	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%
	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%
	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0%	1	1	100,00%
	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%
	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%

	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya bagi Pegawai	318	142	0	0	0%	0	142	44,65%
	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	60	30	30	100%	30	120	80,00%
	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	60	30	0	0	0%	0	30	50,00%
	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	54,77%	75,09%	100,00%	75,09%	85,31%	85,31%	85,31%
	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Kantor	48	24	12	12	100%	12	48	100,00%
	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	225	135	45	45	100%	45	225	100,00%
	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95	57	19	19	100%	13	89	93,68%
						Jumlah Porsi Makan dan Minum	4000	2100	800	800	100%	346	3246	81,15%
	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41	30	9	9	100%	2	41	100,00%
	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1160	696	250	250	100%	150	1096	94,48%
	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada SKPD	27	23	2	2	100%	2	27	100,00%
	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	8	4	2	2	100%	2	8	100,00%
	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	3	1	1	100%	1	5	100,00%
	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	55,97%	74,84%	100,00%	74,84%	93,71%	93,71%	93,71%
	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159	89	30	30	100%	30	149	93,71%
	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	46,14%	68,12%	100,00%	68,12%	70,30%	70,30%	70,30%

	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	981	436	218	218	100%	0	654	66,67%
	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	60	36	12	12	100%	12	60	100,00%
	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	36	12	12	100%	12	60	100,00%
	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60,36%	80,13%	100,00%	80,13%	99,55%	99,55%	99,55%
	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	125	75	12	12	100%	12	99	79,20%
	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140	80	30	30	100%	30	140	100,00%
	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5512	3332	1100	1100	100%	1080	5512	100,00%
2.17	02				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	75,6%	45,90%	53,30%	0,00%	0%	60,70%	60,70%	80,34%
2.17	02	2	01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	100%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2.17	02	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	50	10	0	0	0%	10	10	20,00%
2.17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	27,24%	21,40%	23,25%	23,25%	100,00%	27,24%	27,24%	100,01%

2.17	03	2	01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	83,87%	67,89%	75,88%	75,88%	100,00%	83,87%	83,87%	100,00%
2.17	03	2	01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Koperasi	200	150	175	175	100%	200	200	100,00%
						Jumlah Koperasi yang didampingi RAT	30	15	25	25	100%	30	30	100,00%
2.17	03	2	01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Koperasi	325	275	275	275	100%	325	325	100,00%
						Jumlah Fasilitas Pembubaran Koperasi	25	15	5	5	100%	25	25	100,00%
2.17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/USP berkategori Sehat dan Cukup Sehat	18,52%	7,41%	11,11%	11,11%	100,00%	18,52%	18,52%	100,00%
2.17	04	2	01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180	150	160	160	100%	180	180	100,00%
2.17	04	2	01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian	90	75	80	80	100%	90	90	100,00%
2.17	04	2	01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan koperasi	90	75	80	80	100%	90	90	100,00%
2.17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100,00%
2.17	05	2	01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	405	180	90	60	67%	10	250	61,73%

2.17	05	2	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang dilatih	810	432	300	180	60%	60	672	82,96%
2.17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	4,86%	4,66%	2,92%	6,36%	218%	3,89%	3,89%	79,98%
						Persentase meningkatnya Volume Usaha (Omset) Koperasi	4,86%	3,14%	2,92%	4,00%	137%	3,89%	3,89%	79,98%
2.17	06	2	01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	60	40	50	50	100%	60	60	100,00%
2.17	06	2	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitas	60	40	50	50	100%	60	60	100,00%
2.17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	9,77%	2,38%	1,99%	2,85%	143%	1,99%	7,22%	73,91%
2.17	07	2	01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di berdayakan	5504	2261	1121	1121	100,00%	1121	4503	81,81%
2.17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi Usaha Mikro	3	2	1	1	100%	1	4	133,33%
2.17	07	2	01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pendampingan Pelaku Usaha	80	20	20	20	100%	30	70	87,50%
2.17	07	2	01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah umkm yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha	700	240	240	240	100%	140	620	88,57%

2.17	07	2	01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan	2400	1140	480	480	100%	480	2100	87,50%
						Pelatihan Wirausaha baru	1200	420	240	240	100%	240	900	75,00%
2.17	07	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengakses Permodalan	640	320	120	120	100%	120	560	87,50%
						Pendampingan Pembentukan dan Fasilitas Sarana Prasarana Klinik Klinik K-UMKM	13	3	3	3	100%	7	13	100,00%
2.17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omset UMKM	1,4%	1,35%	1,10%	1,09%	99,09%	1,40%	1,40%	100,00%
2.17	08	2	01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	1700	1081	320	320	100%	320	1721	101,24%
2.17	08	2	01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi akses Pemasaran	600	263	120	120	100%	120	503	83,83%
						Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih Kemasan, dan bantuan sarana prasarana	1100	818	200	200	100%	200	1218	110,73%
						Jumlah Event yang diikuti	17	11	10	10	100%	7	17	100,00%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM;
2. Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru;
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
4. Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

Pada tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melaksanakan 8 Program dengan capaian kinerja Organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 Kegiatan 21 Sub Kegiatan yang berisikan kegiatan rutin Perkantoran pada setiap Perangkat Daerah, dengan rata-rata capaiannya Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar **61,54 (Nilai)**

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam ada 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan yang berisikan kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, capaiannya rata-rata **0%** Dikarenakan Adanya Regulasi Perizinan Simpan Pinjam Sebagaimana Surat Edaran No. 11 Tahun 2022 Tentang Moratorium Perizinan Simpan Pinjam Koperasi Tanggal 17 November 2022

3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi ada 1 Kegiatan, 2 sub kegiatan, yang berisikan kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota dan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten / kota dengan capainnya **100%**

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

Program Peneilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi ada 1 Kegiatan, 2 sub kegiatan yang berisikan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan rata-rata capaiannya **100%**

5. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian ada 1 Kegiatan, 1 sub kegiatan yang berisikan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dengan rata-rata pencapaiannya Program **60%**

6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi ada 1 Kegiatan, 1 sub kegiatan dengan kegiatan yang dilaksanakan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, sandarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/kota, dengan rata-rata pencapaiannya **100%**

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Ukm)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Ukm) ada 1 Kegiatan dan 5 sub Kegiatan, Adapun Kegiatannya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro, dengan rata-rata pencapaiannya **100%**

8. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan Pengembangan UMKM dengan 1 kegiatan, 1 sub kegiatan yang kegiatannya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Design dan Teknologi, dengan tingkat capaiannya **100 %**

Capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja, untuk uraian terhadap pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 (T-C.30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	-	-	7,00%	10,00%	13,00%	16,00%	19,00%	8,87%	50,63%	13,00%	13,00%	Naiknya pesersentase Aset/Omset Koperasi
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	-	-	11,89%	12,24%	12,59%	12,94%	13,28%	12,01%	73,82%	12,59%	12,59%	Naiknya Persentase Usaha Mikro yang Berwirausaha
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	68	70	73	77	80	85,40	85,40	73	77	
4	Persentase Koperasi Aktif	-	-	82,53%	82,59%	82,62%	82,64%	82,67%	82,49%	83,05%	82,62%	82,64%	Pembinaan Kepada Koperasi dalam menjaga Konsistensi Koperasi Aktif
5	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	-	-	15,56%	19,46%	21,40%	23,35%	27,23%	18,96%	20,98%	21,40%	23,35%	Pendampingan Koperasi agar Melaksanakan RAT
6	Persentase Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	-	-	3,70%	7,41%	11,11%	14,81%	18,52%	18,52%	29,19%	11,11%	14,81%	Penilaian Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat

7	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	-	-	45,93%	53,33%	60,74%	68,10%	75,60%	66,67%	0,00%	60,74%	60,74%	Pendampingan Koperasi untuk legalitas ijin simpan pinjam
9	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	-	-	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	2,14%	3,76%	2,92%	3,89%	Pendampingan dan pemberdayaan Koperasi dan Menjalankan usahanya
10	Persentase meningkatnya Omset Koperasi	-	-	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	2,14%	4,66%	2,92%	3,89%	Pendampingan dan pemberdayaan Koperasi dan Menjalankan usahanya
11	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	-	-	0,35%	0,44%	0,46%	0,94%	1,01%	42,23%	0,44%	0,94%	0,94%	
12	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	-	-	1,81%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	3,01%	2,38%	1,99%	1,99%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan
13	Pertumbuhan Omset UMKM	-	-	0,28%	0,57%	0,85%	1,10%	1,40%	0,70%	1,35%	0,85%	0,85%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan melihat kondisi dari tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu :

- a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP.
- b. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi.
- c. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM.
- d. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
- e. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku).
- f. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi.
- g. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan.
- h. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
- i. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- j. Rendahnya kualitas SDM Pembina, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
- k. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- l. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar.
- m. Belum ada wadah/forum untuk menaungi urusan UMKM yang menjadi binaan tiap-tiap OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Paparan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T.C 31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskop-UKM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77	11.811.087.449	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Diskop-UKM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77	24.479.850.642	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	4 Dokumen	290.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	4 Dokumen	290.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	190.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	190.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	2 Laporan	9.087.184.077	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	2 Laporan	14.318.271.622	

1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1050 Orang/bulan	8.982.740.094	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan	14.213.827.639	Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK)
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	104.443.983	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	104.443.983	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	3 Laporan	93.926.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	3 Laporan	93.926.000	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	93.926.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	93.926.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	125.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	245.000.000	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskop-UKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Diskop-UKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	195.000.000	Penyesuaian satuan dan SHS PDH
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskop-UKM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diskop-UKM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	50.000.000	

1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	557.512.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskop-UKM	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	557.512.000	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.398.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.398.000	
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskop-UKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskop-UKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.000.000	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.064.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.064.000	
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	75.050.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	75.050.000	

1.5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskop-UKM	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	249.294.920	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskop-UKM	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	7.191.750.000	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskop-UKM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 unit	1.999.750.000	Belanja kendaraan dinas Jabatan untuk mengganti kendaraan jabatan Ess II, Ess III dan Ess IV, JF Pengawas (Kendaraan sudah tua dan sering rusak sedang-berat)
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskop-UKM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskop-UKM	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	310.000.000	Belum ada Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Picup)
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kota Bangun Darat, Muara Kaman	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4.250.000.000	Pembangunan UMKM Center di 5 Kecamatan
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 unit	249.294.920	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 unit	632.000.000	pengadaan sarana dan Prsarana UMKM Center
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	912.298.592	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	984.439.160	
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	152.859.432	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.000.000	Kenaikan daya dan Beban pembayaran Listrik, Air, Internet

1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	759.439.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskop-UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	759.439.160	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	495.871.860	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	798.951.860	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskop-UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	180.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskop-UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	180.700.000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	80.000.000	Perwatan berupa 27 AC, 20 Pinter, 22 PC/Laptop, 1 Genset
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	285.171.860	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskop-UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	538.251.860	Penyesuaian SHS tenaga kebersihan
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	27,24%	550.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	27,24%	2.000.000.000	

2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	83,87%	550.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	83,87%	2.000.000.000	
2.1.1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Unit Usaha	225.000.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Unit Usaha	1.225.000.000	Pendampingan kelembagaan Koperasi Desa/kelurahan (Kopdes Merah Putih)
2.1.2	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	300 Unit Usaha	325.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	300 Unit Usaha	775.000.000	Pendampingan, pemeriksaan, pengawasan Koperasi memenuhi kewajiban koperasi
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	18,82%	220.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	18,82%	1.500.000.000	
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180 Unit Usaha	220.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180 Unit Usaha	1.500.000.000	
3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	85Unit Usaha	130.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	85Unit Usaha	125.000.000	

3.1.2	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	85 Unit Usaha	90.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	85 Unit Usaha	1.375.000.000	1. Penghargaan Koperasi atas penilaian kesehatannya 2. Peringatan Hari Koperasi Nasional
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertifikat petihan perkoperasian	100,00%	300.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertifikat petihan perkoperasian	100,00%	950.000.000	
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	10 Koperasi	300.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	40 Koperasi	950.000.000	
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Kota Bangun, 2. Marang Kayu, 3. Kenohan, 4. Muara Jawa, 5. Tenggarong, 6. Muara Badak.	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 orang	300.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Kota Bangun, 2. Marang Kayu, 3. Kenohan, 4. Muara Jawa, 5. Tenggarong, 6. Muara Badak.	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 orang	950.000.000	1. Usulan Munrenbang Kecamatan 2. Faslitasi Sertifikasi profesi perkoperasian (BNSP)
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	4,86%	700.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	4,86%	700.000.000	
			Persentase meningkatnya Omzet Koperasi	4,86%				Persentase meningkatnya Omzet Koperasi	4,86%		
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	60 Koperasi	700.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	60 Koperasi	700.000.000	

5.1.1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	100.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	100.000.000	
5.1.2	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	20 Unit Usaha	150.000.000	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	20 Unit Usaha	150.000.000	
5.1.3	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	30 Unit Usaha	100.000.000	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	30 Unit Usaha	100.000.000	
5.1.4	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	30 Unit Usaha	150.000.000	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	30 Unit Usaha	150.000.000	
5.1.5	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	200.000.000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	200.000.000	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	1,99%	2.280.004.943	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	1,99%	3.930.000.000	

6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	1.190 UMKM	2.280.004.943	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	1.190 UMKM	3.930.000.000	
6.1.1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	130.004.943	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	130.000.000	
6.1.2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kembang Janggut, Marang Kayu, Sanga-sanga, Tenggarong, Tenggarong Seberang	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	720 Unit Usaha	350.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kembang Janggut, Marang Kayu, Sanga-sanga, Tenggarong, Tenggarong Seberang	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	720 Unit Usaha	750.000.000	-Tambahan dari Usulan Musrenbang (9 Desa/Kelurahan) - Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk UMKM
6.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	300.000.000	Program Usaha Kecil Idaman
6.1.4	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	15.000 Unit Usaha	1.000.000.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	15.000 Unit Usaha	1.000.000.000	Program Usaha Kecil Idaman

6.1.5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kembang Janggut, Marang Kayu, Sanga-sanga, Tenggarong, Tenggarong Seberang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	300 Orang	500.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	300 Orang	1.750.000.000	Penyesuaian hitungan nilai per peserta (Rp. 5.000.000)
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Kutai Kartanegara	Pertumbuhan Omzet UMKM	1,40%	2.190.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Kutai Kartanegara	Pertumbuhan Omzet UMKM	1,40%	6.440.000.000	
7.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	920 Unit Usaha	2.190.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	940 Unit Usaha	6.440.000.000	
7.1.1	Pengembangan Usaha Mikro	Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kembang Janggut, Kota Bangun Darat, Marang Kayu, Muara Jawa, Muara Kaman, Tenggarong Seberang	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	465.000.000	Pengembangan Usaha Mikro	Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kembang Janggut, Kota Bangun Darat, Marang Kayu, Muara Jawa, Muara Kaman, Tenggarong Seberang	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	3.865.000.000	-Program Usaha Kecil Idaman - Fasilitasi Penguatan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM melalui UMKM Center (Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat untuk alat dan mesin produksi) - Lokasi : 5 Kecamatan (Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kota Bangun Darat, Muara Kaman) - Penguatan Kapasitas Pengelola Klinik dan Manajemen Bisnis UMKM Center - Fasilitasi Promosi Produk UMKM dan Event UMKM
7.1.2	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah yang Difasilitasi	360 Orang	725.000.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah yang Difasilitasi	360 Orang	725.000.000	Program Usaha Kecil Idaman

7.1.3	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Tenggarong, Loa Kulu, Anggana, Kota Bangun Darat, Kembang Janggut, Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Muara Muntai, Marang Kayu	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	10 Unit Usaha	500.000.000	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Tenggarong, Loa Kulu, Anggana, Kota Bangun Darat, Kembang Janggut, Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Muara Muntai, Marang Kayu	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	30 Unit Usaha	1.350.000.000	Pendampingan usaha mikro (Kliknik UMKM) dalam mengembangkan dan mengakselerasi bisnis, mereferensi ide bisnis, mencari peluang permodalan, mengatur finansial dengan baik dan berinovasi serta pelayanan pendampingan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kecamatan
7.1.4	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	400 Unit Usaha	500.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	400 Unit Usaha	500.000.000	Program Usaha Kecil Idaman
8	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penguatan Badan Hukum Koperasi	100,00%	200.000.000	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penguatan Badan Hukum Koperasi	100,00%	1.300.000.000	
8.1	Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi	10 Kelompok	100.000.000	Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi	10 Kelompok	100.000.000	
8.1.1	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	10 Kelompok	100.000.000	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	10 Kelompok	100.000.000	

8.2	Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang mendapatkan fasilitas penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	15 Unit Usaha	100.000.000	Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Koperasi yang mendapatkan fasilitas penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	200 Unit Usaha	1.200.000.000	
8.2.1	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	15 Koperasi	100.000.000	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	200 Koperasi	1.200.000.000	Fasilitasi Koperasi untuk mendapatkan akta notaris (baru/perubahan) termasuk kopdes merah putih
	JUMLAH				18.251.092.392					41.299.850.642	

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan Program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terdapat perbedaan rincian dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, perbedaan tersebut pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian Output serta jumlah target kegiatan;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun ini Pembahasan dilakukan terlebih dahulu pengentrian usulan pada SIPD-RI sebagai bahan Pembahaan yang kemudian Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM didiskusikan dalam pembahaan Forum OPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pembahaan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan Kesepakatan hasil Musrenbang.

Pada Pembahasan di Forum OPD ada beberapa Program/Kegiatan/Subkegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM, usulan dari pemangku kepentingan tersaji dalam Tabe berikut ini.

Tabel 2.4 (TC 3.2)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DESA TELUK BINGKAI RT 001 KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	Murenbang Kecamatan, Pelatihan Akuntansi Koperasi
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jl. P. Suta Kanan RT. 02, Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara		30 Orang	Murenbang Kecamatan, Pelatihan Akuntansi Koperasi
3	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Desa Santan Tengah - 0.011681355457027871, 117.46628668507502, Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara		30 Orang	Murenbang Kecamatan, Pelatihan Akuntansi Koperasi
4	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jl. Kapitan Toko Lima RT. 10, Kec, Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara		30 Orang	Murenbang Kecamatan, Pelatihan Akuntansi Koperasi

5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jalan Ahmad Sifa RT 13 Kelurahan Dondang Lat .0.7731255° , Long 117.2287015° p.2, Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara		30 Orang	Murenbang Kecamatan, Pelatihan Akuntansi Koperasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Loa Duri Ulu RT.05 Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Perizinan Legalitas Usaha bagi UMKM (NiB/ Nomor Induk Berusaha)
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Perizinan Legalitas Usaha bagi UMKM (NiB/ Nomor Induk Berusaha)
3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kelurahan Tama Pole, Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitasi Perizinan Legalitas Usaha bagi UMKM (NiB/ Nomor Induk Berusaha)
4	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Desa Sidomulyo, Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan Produk UMKM (Sertifikasi halal, SP-PIRT)
5	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Desa Kembang Janggut , Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan Produk UMKM (Sertifikasi halal, SP-PIRT)
6	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Desa Kota Bangun II, Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan Produk UMKM (Sertifikasi halal, SP-PIRT)
7	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Loa Duri Ulu RT 01 RW 01 Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan Produk UMKM (Sertifikasi halal, SP-PIRT)
8	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	RT. 16 Dusun II Desa Sebuntal , Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan Produk UMKM (Sertifikasi halal, SP-PIRT)
9	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jl. Karya Jaya RT.004 Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja, Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Kamus Usulan: Fasilitasi Perizinan Produk UMKM (Sertifikasi halal, SP-PIRT)
10	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan Ikan
11	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	RT 17 Dusun II Desa Sebuntal , Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan Ikan
12	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Gabungan Kelompok (Istri Nelayan), pendingin, Sanga-sanga, Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan Ikan
13	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pokdakan Mekar Melati, pendingin, Sanga-sanga, Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan Ikan

14	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jl. anggana Rt.15 kel. panji, Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan Ikan
15	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dusun Rapak Rejo Desa Kerta Buana, Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara		30 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Pelatihan, Pembinaan dan Pendampingan Bagi Usaha Mikro Olahan Buah, Sayuran dan Ikan
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
1	Pengembangan Usaha Mikro	Desa Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitas Promosi Produk UMKM
2	Pengembangan Usaha Mikro	RT 005 Dusun Jambu Rejo, Kec. Kota Bangun Darat Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitas Promosi Produk UMKM
3	Pengembangan Usaha Mikro	Lokasi Pembangunan Pasar Desa Kota Bangun II, Kec. Kota Bangun Darat, Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitas Promosi Produk UMKM
4	Pengembangan Usaha Mikro	Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitas Promosi Produk UMKM
5	Pengembangan Usaha Mikro	Desa Kersik, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitas Promosi Produk UMKM
6	Pengembangan Usaha Mikro	rt 07, Desa Muara Badak ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitas Promosi Produk UMKM
7	Pengembangan Usaha Mikro	Muara Jawa Pesisir, Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitas Promosi Produk UMKM
8	Pengembangan Usaha Mikro	Desa Muara Kaman Ilir RT 9, Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitas Promosi Produk UMKM
9	Pengembangan Usaha Mikro	Dusun Rapak Rejo, Desa Kerta Buana, Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan, Fasilitas Promosi Produk UMKM

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOPERASI DAN UKM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah membawa perubahan sistem Pemerintahan Indonesia yang sentralistik ke arah desentralistik.

Dan bila dikaitkan dengan Urusan di Bidang Koperasi dan UKM maka Pemberdayaan Koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka pertuasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UKM :

Kebijakan Nasional Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang berdaulat, mandiri, dan maju dengan Fokus Kontribusi PDB sector Koperasi, Mewujudkan Koperasi Model Baru dan Modern, Pertumbuhan Stat-Up berbasis Koperasi;
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global dengan Focus, Kontribusi PDB di sector UMKM, Nilai Ekspor UMKM, Nilai Investasi UMKM, UKM Naik Kelas, Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM, Rasio Kewirausahaan;

Kebijakan Propinsi Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :
Meningkatkan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM, melalui Sumbangan Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB dengan focus menciptakan Koperasi Unggulan, dan UKM Unggulan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih dengan Fokus Pembangunan Tahun 2026 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dapat diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Tujuan Kedua, Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM dengan Fokus Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro dan koperasi terutama dari Kelembagaan, akses permodalan, manajemen usaha, teknologi Produksi, Informasi, dan pemasaran;

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu 5 (lima) tahun.

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakn secara operasional dengan memperhatikan, ketersediaan sumber daya organisasi.

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sasaran yang akan dicapai sebagai berikut

1. Sasaran Pertama, *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM;*

2. Sasaran Kedua, Mempertahankan Jumlah Koperasi Aktif, dengan indikator Persentase Koperasi Aktif;
3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha, dengan Indikator Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha;
4. Sasaran Keempat, Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi, Indikatornya Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi

Tabel 3. 1

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	Kondisi Awal	INDIKATOR				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UMKM	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Persentase	67.76	71,94%	70%	73%	77%	80%
2	Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya	Persentase	4%	7%	10%	13%	16%	19%
			Persentase Koperasi yang Aktif	Persentase	82%	82%	82%	82%	82%	82%
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase	12%	12,57%	12,75%	12,93%	13,11%	13,28%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- 1. Mendukung pencapaian sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Fokus / Tema Pembangunan Kutai Kartanegara “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Yang Berkelanjutan”;
- 2. Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, dengan Misi Kepala Daerah terpilih :



Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini Dinas Koperasi memperhatikan berbagai Regulasi dan memastikan Sinkronisasi Substansi dan Proses dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mempunya amat bertanggung jawab dalam menyusun program, yang berpedoman pada kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah;

Dalam mencapai target perangkat daerah yang termuat pada Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjalankan tugas dan Fungsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Perumusan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mengah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Rincian dan Jumlah Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2026 DAN TAHUN MAJU 2027

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Diskop-UKM	77	24.479.850.642			77.00	20.852.561.719
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencanam Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskop-UKM	4 Dokumen	290.000.000	Apbd		4 Dokumen	400.000.000
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	2 Dokumen	100.000.000	Apbd		2 Dokumen	200.000.000
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	2 Dokumen	190.000.000	Apbd		2 Dokumen	200.000.000
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Diskop-UKM	2 Dokumen	14.318.271.622	Apbd		2 Dokumen	16.413.827.639
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Diskop-UKM	1260 Orang/bulan	14.213.827.639	Apbd	Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK)	1260 Orang/bulan	16.213.827.639
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104.443.983	Apbd		1 Laporan	200.000.000

2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Diskop-UKM	1 Laporan	93.926.000	Apbd		1 Laporan	175.000.000
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	93.926.000	Apbd		1 Laporan	175.000.000
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskop-UKM	100%	245.000.000	Apbd		1 Dokumen	400.000.000
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskop-UKM	90 Paket	195.000.000	Apbd	Penyesuaian satuan dan SHS PDH	90 Paket	200.000.000
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	30 Orang	50.000.000	Apbd		80 Orang	200.000.000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskop-UKM	100%	557.512.000	Apbd		100%	1.350.000.000
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	10.000.000	Apbd		2 Paket	50.000.000
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	72.398.000	Apbd		2 Paket	100.000.000
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	Apbd		2 Paket	75.000.000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	2 Paket	50.000.000	Apbd		2 Paket	100.000.000

2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Apbd		1 Dokumen	75.000.000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	50 Laporan	250.064.000	Apbd		150 Laporan	450.000.000
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.050.000	Apbd		1 Dokumen	300.000.000
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Apbd		1 Dokumen	200.000.000
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Diskop-UKM	100%	7.191.750.000	Apbd		100%	249.294.920
2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Diskop-UKM	10 unit	1.999.750.000	Apbd	Belanja kendaraan dinas Jabatan untuk mengganti kendaraan jabatan Ess II, Ess III dan Ess IV, JF Pengawas (Kendaraan sudah tua dan sering rusak sedang-berat)		
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Unit	310.000.000	Apbd	Belum ada Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Picup)		
2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kota Bangun Darat, Muara Kaman	5 Unit	4.250.000.000	Apbd	Pembangunan UMKM Center di 5 Kecamatan		

2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	30 unit	632.000.000	Apbd	pengadaan sarana dan Prsarana UMKM Center	20 unit	249.294.920
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	984.439.160	Apbd		100%	984.439.160
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	12 Laporan	225.000.000	Apbd	Kenaikan daya dan Beban pemabayaran Listrik, Air, Internet	12 Laporan	225.000.000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	12 Laporan	759.439.160	Apbd		12 Laporan	759.439.160
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	798.951.860	Apbd		100%	880.000.000
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	12 unit	180.700.000	Apbd		12 unit	300.000.000
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	70 unit	80.000.000	Apbd	Perwatan berupa 27 AC, 20 Pinter, 22 PC/Laptop, 1 Genset	70 unit	80.000.000
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	3 Unit	538.251.860	Apbd	Penyesuaian SHS tenaga kebersihan	3 Unit	500.000.000

2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	Kab. Kutai Kartanegara	27,24%	2.000.000.000	Apbd		27,24%	1.000.000.000
2.17.03.02.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	83,87%	2.000.000.000	Apbd		83,87%	1.000.000.000
2.17.03.02.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	200 Unit Usaha	1.225.000.000	Apbd	Pendampingan kelembagaan Koperasi Desa/ kelurahan (Kopdes Merah Putih)	200 Unit Usaha	500.000.000
2.17.03.02.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	300 Unit Usaha	775.000.000	Apbd	Pendampingan, pemeriksaan, pengawasan Koperasi memenuhi kewajiban koperasi	325 Unit Usaha	500.000.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	Kab. Kutai Kartanegara	18,82%	1.500.000.000	Apbd		18,82%	1.500.000.000
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Kab. Kutai Kartanegara	180 Unit Usaha	1.500.000.000	Apbd		200 Unit Usaha	1.500.000.000
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	90 Unit Usaha	125.000.000	Apbd		100 Unit Usaha	500.000.000
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Kutai Kartanegara	90 Unit Usaha	1.375.000.000	Apbd	1. Penghargaan Koperasi atas penilaian kesehatannya 2. Peringatan Hari Koperasi Nasional	100 Unit Usaha	1.000.000.000

2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertifikat petihan perkoperasian	Kab. Kutai Kartanegara	100,00%	950.000.000			100,00%	300.000.000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab. Kutai Kartanegara	40 Koperasi	950.000.000	Apbd		10 Koperasi	300.000.000
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1. Kota Bangun, 2. Marang Kayu, 3. Kenohan, 4. Muara Jawa, 5. Tenggarong, 6. Muara Badak.	300 orang	950.000.000	Apbd	1. Usulan Munrenbang Kecamatan 2. Faslitasi Sertifikasi profesi perkoperasian (BNSP)	180 orang	300.000.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	4,86%	700.000.000	Apbd		4,86%	1.900.000.000
		Persentase meningkatnya Omzet Koperasi		4,86%				4,86%	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	60 Koperasi	700.000.000	Apbd		60 Koperasi	1.900.000.000
2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	30 Keluarga	100.000.000	Apbd		30 Keluarga	300.000.000
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit Usaha	150.000.000	Apbd		20 Unit Usaha	300.000.000
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Kab. Kutai Kartanegara	30 Unit Usaha	100.000.000	Apbd		30 Unit Usaha	300.000.000
2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Kab. Kutai Kartanegara	30 Unit Usaha	150.000.000	Apbd		30 Unit Usaha	200.000.000
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit Usaha	200.000.000	Apbd		100 Unit Usaha	800.000.000

2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	1,99%	3.930.000.000	Apbd		1,99%	2.700.000.000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	Kab. Kutai Kartanegara	1.190 UMKM	3.930.000.000	Apbd		1.260 UMKM	2.700.000.000
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit Usaha	130.000.000	Apbd		40 Unit Usaha	200.000.000
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kembang Janggut, Marang Kayu, Sanga-sanga, Tenggarong, Tenggarong Seberang	720 Unit Usaha	750.000.000	Apbd	-Tambahan dari Usulan Musrenbang (9 Desa/Kelurahan) - Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk UMKM	720 Unit Usaha	500.000.000
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	150 Orang	300.000.000	Apbd		200 Orang	500.000.000
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kab. Kutai Kartanegara	15.000 Unit Usaha	1.000.000.000	Apbd		15.000 Unit Usaha	1.000.000.000
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kembang Janggut, Marang Kayu, Sanga-sanga, Tenggarong, Tenggarong Seberang	300 Orang	1.750.000.000	Apbd	Penyesuaian hitungan nilai per peserta (Rp. 5.000.000)	300 Orang	500.000.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM	Kab. Kutai Kartanegara	1,40%	6.440.000.000	Apbd		1,40%	3.300.000.000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	940 UMKM	6.440.000.000	Apbd		920 UMKM	3.300.000.000

2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kembang Janggut, Kota Bangun Darat, Marang Kayu, Muara Jawa, Muara Kaman, Tenggarong Seberang	150 Unit Usaha	3.865.000.000	Apbd	-Program Usaha Kecil Idaman - Fasilitasi Penguatan Promosi dan Pemasaran Produk UMKM melalui UMKM Center (Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat untuk alat dan mesin produksi) - Lokasi : 5 Kecamatan (Tenggarong, Loa Janan, Samboja Barat, Kota Bangun Darat, Muara Kaman) - Penguatan Kapasitas Pengelola Klinik dan Manajemen Bisnis UMKM Center - Fasilitasi Promosi Produk UMKM dan Event UMKM	150 Unit Usaha	1.500.000.000
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	360 Orang	725.000.000	Apbd	Program Usaha Kecil Idaman	360 Orang	800.000.000
2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Tenggarong, Loa Kulu, Anggana, Kota Bangun Darat, Kembang Janggut, Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Muara Muntai, Marang Kayu	30 Unit Usaha	1.350.000.000	Apbd	Pendampingan usaha mikro (Kliknik UMKM) dalam mengembangkan dan mengakselerasi bisnis, mereferensi ide bisnis, mencari peluang permodalan, mengatur finansial dengan baik dan berinovasi serta pelayanan pendampingan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kecamatan	10 Unit Usaha	500.000.000
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kab. Kutai Kartanegara	400 Unit Usaha	500.000.000	Apbd	Program Usaha Kecil Idaman	400 Unit Usaha	500.000.000

2.17.09	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase Penguatan Badan Hukum Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	100,00%	1.300.000.000	Apbd		100,00%	600.000.000
2.17.09.4.01	Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi	Jumlah Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	10 Kelompok	100.000.000	Apbd		10 Kelompok	100.000.000
2.17.09.4.01.0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	10 Kelompok	100.000.000	Apbd		10 Kelompok	100.000.000
2.17.09.4.02	Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan fasilitas penguatan peran notaris pembuat akta koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	15 Unit Usaha	1.200.000.000	Apbd		15 Unit Usaha	500.000.000
2.17.09.4.02.0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	Kab. Kutai Kartanegara	15 Koperasi	1.200.000.000	Apbd	Fasilitasi Koperasi untuk mendapatkan akta notaris (baru/perubahan) termasuk kopdes merah putih	15 Koperasi	500.000.000
	JUMLAH				41.299.850.642				32.152.561.719

BAB V PENUTUP

1. Catatan Penting

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun berdasarkan Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana program di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur pada periode Tahun 2026. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya

guna serta pelaksanaan mendukung Indikator Kinerja Utama sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara. RENJA PD juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara. RENJA juga berperan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan tahun 2026, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara yang Optimal.

Tenggarong, 21 Maret 2025
Plt.Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara



H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi., M.A.P
NIP.197401222001121002

LAMPIRAN
CAPAIAN PROGRAM DEDIKASI
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan
(Pembangunan Koperasi yang Sehat dan Produktif Berbasis Kawasan)

Koperasi Yang tersebar di 5 Kawasan Pertanian Sektor Pertanian,Perkebunan:

NO.	KECAMATAN	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Ketaatan/Aktif RAT	
				Aktif	Tidak
1	MUARA KAMAN	4	139	-	4
2	SEBULU	9	759	2	7
3	TENGGARONG	2	63	-	2
4	TENGGARONG SEBERANG	5	1,001	4	1
5	LOA KULU	7	710	5	2
6	MARANGKAYU	4	22	1	3
	JUMLAH	31	2,694	12	19

Daftar Koperasi Yang tersebar di 5 Kawasan Pertanian Sektor Pertanian,Perkebunan :

NO	NAMA KOPERASI	KECAMATAN	ALAMAT/DESA
1	Tani Makmur Andalan	Muara Kaman	Sido Mukti
2	Mitra Sejahtera Abadi	Muara Kaman	Bunga Jadi
3	Karya Bangsa Mandiri	Muara Kaman	Desa Bunga Jadi
4	Sukses Sejahtera	Muara Kaman	Puan Cepak
5	Wiyata Mandala	Sebulu	Manunggal Jaya
6	Sawit Lestari Harapan Bersama	Sebulu	Sumber Sari
7	Serba Usaha Etam Sejahtera Bersama	Sebulu	Sumber Sari
8	Sama Maju Jaya	Sebulu	Segihan
9	Segihan Mitra Lestari	Sebulu	Segihan
10	Karya Etam	Sebulu	Segihan
11	Pemuda Mandiri Sejahtera	Sebulu	Tanjung Harapan
12	GUNUNG DED'EH SEJAHTERA	Sebulu	Sebulu Ilir
13	HIDUP BERSAMA	Sebulu	Serbaya
14	Karya Makmur Mandiri	Tenggarong	Bukit Biru
15	Lkm-A Gapoktan Sukodadi	Tenggarong	Mangkurawang
16	Tri Sandya Yudha	Loa Kulu	Jembayan
17	Setia Budi	Loa Kulu	Rempanga
18	Lkm-A Gapoktan Mulya Abadi	Loa Kulu	Sumber Sari
19	Mina Loa Kulu Sejahtera	Loa Kulu	Ponoragan
20	Tunas Harapan	Loa Kulu	Sungai Payang
21	Syariah Sejahtera	Loa Kulu	Jonggon
22	Sejahtera Maju Bersama	Loa Kulu	Lung Anai
23	Perikanan Cattoni Jaya Damai Sejahtera	Marang Kayu	Desa Santan Ilir
24	Sawit Tani Jaya	Marang Kayu	Desa Gunung Menangis
25	Dana Karya Mandiri	Marang Kayu	Perangat Selatan
26	Cahaya Sinar Pagi	Marang Kayu	Santan Ilir
27	Semoga Jaya	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya
28	Galang Rejeki	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo
29	Rukun Makmur Sejahtera	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo
30	Bina Tani Jaya Bersama	Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman
31	Setia Abadi	Tenggarong Seberang	Suka Maju (Dp)

Metode Pelaksanaan dalam Memfasilitasi Koperasi yang bergerak di Sektor Pertanian dalam arti luas melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Sektor Usaha Pertanian ;

- a. Melakukan Identifikasi Rapat penyusunan Kertas Kerja Identifikasi yang paling utama berisi Aset Koperasi, Omset Koperasi, Usaha Utama Yang dijalankan,

Dan apa ada Usaha-usaha lainnya dilakukan Koperasi, Apa permasalahannya dan apa yang diharapkan dari Pembina;

- b. Penyusunan Jadwal dan Identifikasi Awal Sasaran Koperasi yang akan menjadi target dalam pengisian Kertas Kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- c. Mengumpulkan hasil Identifikasi dan membuat Analisis dan rencana Tindak lanjut / Intervensi yang akan diberikan dalam Penguatan dan Penyiapan Kelembagaan Koperasi di Sektor Pertanian dalam arti luas;
- d. Tindak lanjut / Intervensi yang bisa dilakukan oleh Pembina dalam mengatasi permasalahan Koperasi di Sektor Pertanian dalam arti luas (dari Aspek Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Kelembagaan, Manajemen, Pelaporan Ketaatan Koperasi, Tingkat SDM Koperasi dst);
- e. Intervensi lanjutan bila diperlukan membuat Kelas Pemberian Bimbingan Teknis dalam Penyusunan Laporan Neraca Keuangan, Pembuatan NIB, Pelaporan Pajak dan Akses Pasar/Penguasaan IT/Digitalisasi Koperasi;

Faktor Penghambat dan Pendorong:

1. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan program? Minimnya Kader Muda dalam mengelola Koperasi dan masih kalangan tua, sementara tantangan Teknologi dan Informasi di era globalisasi dan masih kurangnya SDM Pembina Koperasi;
2. Apa saja faktor yang mendorong keberhasilan program Kepemimpinan yang kuat, partisipasi aktif anggota, manajemen yang efisien, dukungan eksternal, akses ke sumber daya, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci untuk memastikan koperasi dapat berkembang dan berfungsi secara efektif. Evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan juga penting untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan hasil dari program;

Rekomendasi (Rencana Tindak):

Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program, memperluas manfaatnya, dan mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi:

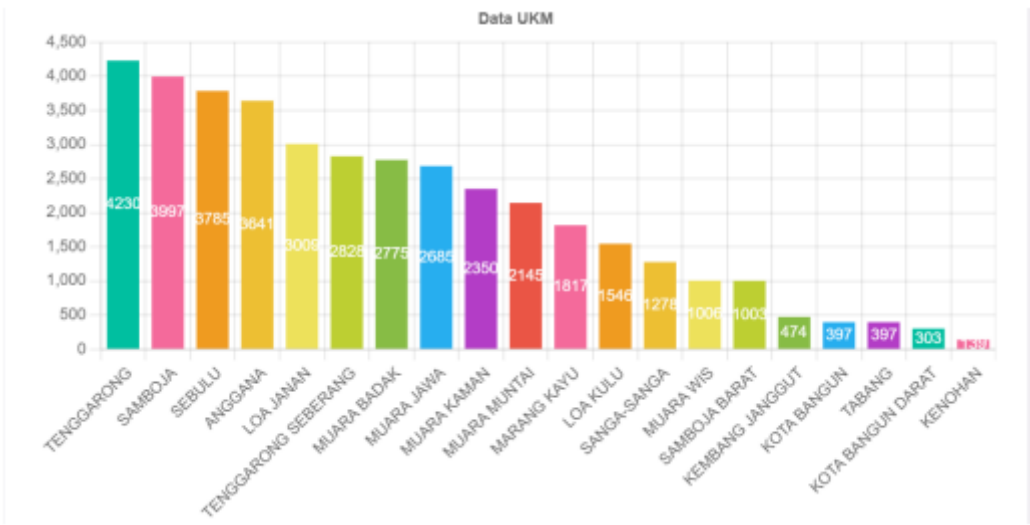
- Pelatihan Manajemen Koperasi, Sediakan pelatihan manajerial lanjutan untuk pengurus koperasi, termasuk dalam bidang keuangan, perencanaan strategis, dan kepemimpinan (Kader Milenial) dan penambahan dan peningkatan SDM Pembina Koperasi;
- Program Peningkatan Keterampilan: pelatihan untuk anggota koperasi dalam teknik pertanian modern, teknologi baru, dan manajemen usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bersama Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian;
- Penguatan Pemanfaatan Platform Digital untuk memasarkan produk secara online, meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas, dan mempermudah transaksi

- Riset dan Pengembangan, untuk mencari solusi inovatif bagi tantangan Koperasi dan meningkatkan metode /model usaha Koperasi;
- Membangun kesadaran mengenai koperasi adalah langkah penting untuk memperkuat dan mengembangkan model bisnis ini dalam masyarakat;

USAHA KECIL IDAMAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia termasuk di Kutai Kartanegara yang merupakan mata pencarian mayoritas masyarakat, sehingga urgensi penguatan sektor UMKM menjadi penting untuk diintervensi oleh Pemerintah. Besarnya pasar tenaga kerja Indonesia dan keinginan untuk menciptakan stabilitas ekonomi harus didukung oleh iklim usaha yang lebih baik. Kualitas iklim usaha Indonesia masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal kemudahan usaha, kebijakan di bidang Kewirausahaan, kondisi infrastruktur untuk berwirausaha, serta karakteristik pelaku usaha.

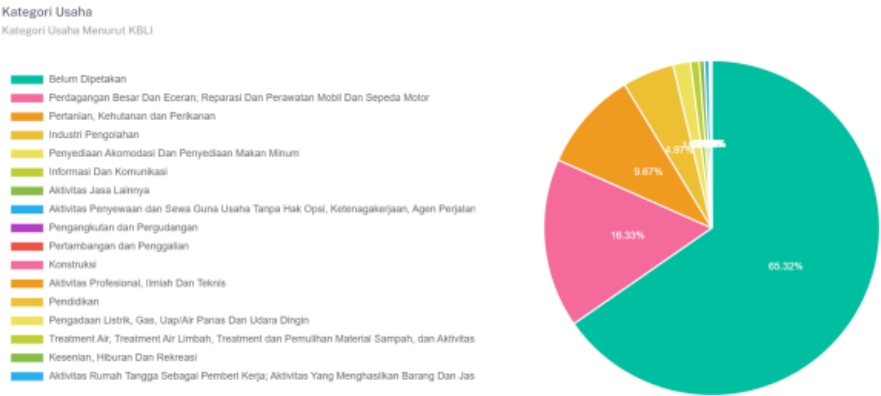
Jumlah penduduk Kutai Kartanegara yang menjadi pelaku usaha tergolong tinggi, data statistik menunjukkan hingga Juni 2024 terdapat sejumlah 66.833 pelaku UMKM yang terdata, dan terdapat sejumlah 43.985 yang telah memiliki NIB yang tersebar di 20 Kecamatan. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan keinginan untuk berkembang, sehingga tingginya minat melakukan usaha tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya usaha mikro atau ultra mikro yang melakukan usaha tanpa adanya tenaga kerja (tetap dan paruh waktu) yang dibayar. Selain itu, keinginan para pelaku usaha untuk memasuki pasar global atau melakukan ekspor cenderung rendah. Untuk itu, para pelaku usaha di Kutai Kartanegara perlu dikembangkan menjadi Wirausaha.



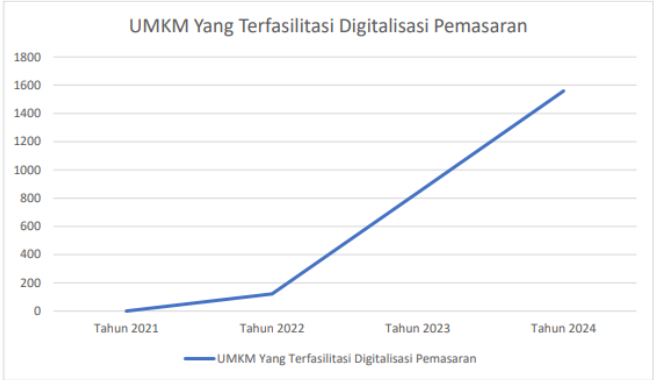
Pelaksanaan program Usaha Kecil IDAMAN dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro,
- 2) Program Pengembangan UMKM.

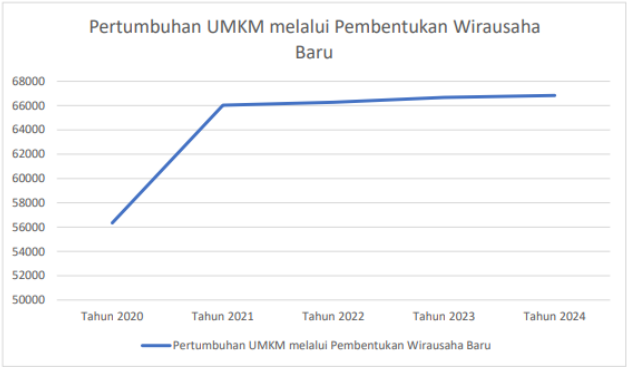
Program pemberdayaan UMKM dilaksanakan dengan tolak ukur indikator yaitu persentase UMKM yang difasilitasi, program ini dilaksnakaan melalui kegiatan pemberdayaan usaha (pelatihan Wirausaha Baru), pelatihan kelembagaan usaha mikro, serta pengembangan usaha pada Wirausaha Baru yang dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengundang masyarakat umum yang memiliki keminatan untuk berwirausaha, pelaku wirausaha baru, masyarakat yang termasuk dalam data DTKS / masyarakat miskin, masyarakat yang bergerak pada sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengembangkan usaha berdasarkan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing.



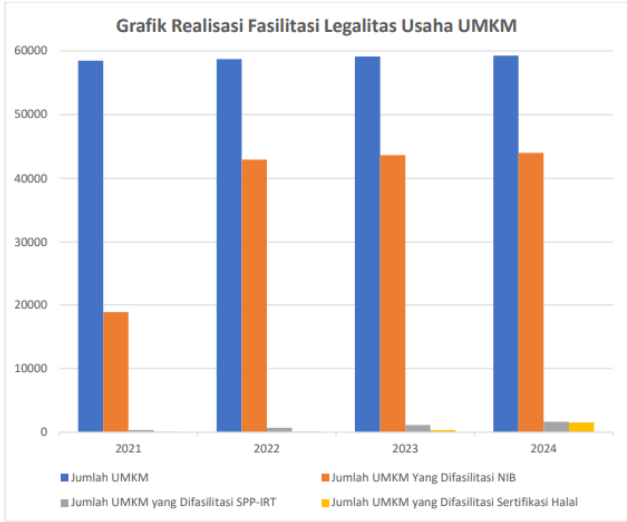
Realisai



Realisasi program penyediaan dan kerjasama dengan e-commerce melalui program digitalisasi dan pemasaran berbasis online telah menyentuh hingga 1.559 pelaku UMKM melalui berbagai macam platform e-commerce



Program fasilitasi pembentukan Wirausaha Baru sejak diawali tahun 2021 hingga Juni Tahun 2024 telah bertumbuh sebesar 10.490 UMKM (dari eksisting sejumlah 56.343 menjadi 66.833 di Juni 2024



Progress realisasi program fasilitasi legalitas usaha UMKM dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, serta Petugas Pendamping Produk Halal yang dilaksanakan on the spot di 20 Kecamatan di Kutai Kartanegara telah tercapai sampai dengan Juni 2024 di angka 74,20% dari total seluruh UMKM sebagaimana sajian grafik diatas, dan hal ini masih terus berproses dengan harapan seluruh pelaku UMKM memiliki legalitas usaha



Program Kredit Kukar Idaman sendiri telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2023, dimana hingga bulan Juli Tahun 2024 ini telah tersalurkan kepada 1.204 nasabah pelaku UMKM dengan total nilai pinjaman sebesar Rp. 23.411.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah)

Faktor penghambat dan Pendorong :

Perjalanan program dedikasi Usaha Kecil IDAMAN tentu saja memiliki berbagai tantangan dan kendala dalam perjalanannya, seperti besarnya jumlah eksisting UMKM yang ada dibanding dengan target dan realisasi tahunan yang dicapai, keterbatasan dukungan anggaran untuk menyentuk bantuan ke seluruh UMKM, masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk bangkit dan mengembangkan usahanya, serta persaingan dengan produk-produk dari daerah sekitar menjadi tantangan dan kendala dalam berjalannya program ini.

Namun terdapat pula banyak faktor pendukung dari program ini, antara lain banyaknya produk potensial yang ada di Kutai Kartanegara, sumber daya alam sebagai bahan baku lokal yang dapat dimanfaatkan, perkembangan kemajuan era digital yang memudahkan akses pemasaran, hingga meningkatnya kebutuhan beli masyarakat lokal dalam negeri yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM ini masih dapat dilihat kemajuannya melalui program dedikasi Usaha Kecil IDAMAN ini

Penutup

Setelah adanya program dedikasi Usaha Kecil IDAMAN sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2024 ini ekspansi produk-produk dari Kutai Kartanegara ke pasar sangat pesat, bermunculan produk-produk unggulan khas dari setiap Kecamatan yang mudah dijumpai di berbagai tenant penjualan di kota, varian dan diversifikasi produk yang berbagai macam, hingga berbagai macam produk yang telah berhasil melakukan penjualan di level lokal, regional, nasional, hingga menembus pasar ekspor



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**